**Mengais Setrum TPA Punggur**

*Oleh : Yermia Riezky*

(terbit di Majalah Batam Pos, edisi 40, 3 November 2013)

*Pemerintah Kota Batam kembali memberikan pengelolaan TPA Punggur kepada pihak swasta. Dari sampah yang menggunung, pihak swasta harus mengubah limbah domestik itu menjadi energi listrik. Kerugian yang dialami swasta dalam proyek serupa tahun 2010 tak menurunkan minat puluhan perusahaan ikut dalam proses pra kualifikasi pelelangan. Seperti apa potensi sampah di kota kepulauan berpenduduk 1,1 juta jiwa ini ?*

Kawanan burung pipit segera terbang saat truk sampah masuk ke area pembuangan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Telagapunggur, Kecamatan Nongsa, Batam. Kira-kira ribuan ekor jumlahnya. Mereka melayang di atas gunungan sampah di area seluas 17 hektare itu.

Rata-rata tinggi gunungan sampah di TPA Punggur, begitu orang Batam menyebut lokasi itu, mencapai 10 meter dari jalan di sekitarnya. Sebagai lokasi pembuangan akhir, segala sampah buangan warga Batam berkumpul di sana. Jenis-jenis sampah rumah tangga seperti pakaian, plastik, kaca, dan kertas akan tampak sejauh mata memandang. Di beberapa titik, limbah-limbah sisa industri dibuang di dalam karung-karung yang terbuka. Dari dalam karung tersingkap material berwarna gelap seperti sisa bakaran.

Tak ada lagi sampah-sampah organik yang tersisa kecuali truk sampah datang dan membuang muatannya.

Kawasan TPA Punggur pada awalnya sebuah kawasan hutan yang dialihfungsikan sebagai penampungan akhir sampah-sampah yang diproduksi lebih dari 1,1 juta penduduk Kota Batam. Pohon-pohon tumbuh rapat mengelilingi kawasan itu kecuali di bagian selatan yang lebih terbuka. Gunungan sampah terletak di lereng yang miring ke arah barat daya.

Kantor pengelola kawasan berada sejauh 20 meter dari gerbang TPA Punggur. Luasnya hanya 5 x 4 meter. Di depan kantor terdapat sebuah jembatan timbang yang berfungsi menimbang berat sampah yang dibawa truk sampah.

Tiap lima menit, ada saja truk yang datang, penuh dengan tumpukan sampah dengan bau menusuk hidung, busuk bercampur amis. Seluruh truk memasang jaring menutupi tumpukan sampah. Itu wajib! Tanpa jaring penutup bak, truk tak boleh melalui jembatan timbang.

Usai ditimbang, sopir kemudian turun dan menuju ke sebuah loket di kantor pengelola. Ia lalu mendapat surat keterangan dari petugas loket.

Salah satu pekerja di kantor pengelolaan mengatakan, ada sekitar 90 unit truk yang berfungsi mengangkut sampah di Batam. Jumlah itu dioperasikan oleh tiga perusahaan pemenang tender pengangkutan sampah di tiga walayah yang ditetapkan pemerintah kota Batam. Masing-masing unit melakukan dua perjalanan mengangkut sampah setiap harinya. Sekali menimbang, setiap truk dapat memuat hingga tiga ton. Artinya, setiap hari rata-rata 540 ton sampah Kota Batam dibuang di TPA Punggur.

Lebih jauh ke dalam kawasan pembuangan ratusan pemulung mengais sampah-sampah plastik, karung, dan botol plastik. Tak kenal lelah mereka mendaki bukit sampah. Setelah karung yang mereka pikul penuh, mereka menuju ke lokasi tempat menumpuk semua barang yang dikumpulkan. Tiap orang punya lokasinya masing-masing. Kantung dan karung berisi botol plastik bekas ramai tergeletak di masing-masing pos.

Mereka hanya punya waktu satu bulan di menumpuk di satu lokasi. Kalau tak segera dipindahkan, buldoser akan menggusur tempat para pemulung menumpuk hasil mengais TPA selama sebulan.

"Beberapa tahun lalu kami masih bisa menumpuk barang selama enam bulan. Sekarang hanya satu bulan karena sampah semakin banyak, sehingga harus cepat diratakan dengan buldoser," kata Ubay, salah seorang pemulung.

Usai diratakan buldoser, pengelola kemudian menimbun sampah dengan tanah. Itu sebabnya di banyak terlihat tanah di lereng gunungan sampah TPA Punggur.

Pemulung yang ramai mengais sampah di TPA Punggur banyak berasal dari rumah-rumah liar yang dibangun para pendatang. Ada tiga kampung rumah liar yang berkumpul lahan di sekitar TPA. Ketiganya adalah Kampung Sunda, Kampung Merantau, dan Kampung Karawang. Ratusan orang mulai dari anak-anak sampai sepuh mengais sampah di kawasan itu.

"Jumlahnya kira-kira 200 orang," kata Syamsul, pemulung yang sudah mengais di TPA Punggur selama lima tahun. Ia mengaku tak pernah benar-benar menghitung jumlahnya. Namun ia yakin jumlah mereka lebih dari 100 orang.

Ubay, Syamsul dan pemulung lain kebanyakan mengumpulkan sampah-sampah yang memiliki nilai ekonomi relatif tinggi di pasar. Di antaranya plastik dan botol air mineral. Mereka tinggal membawa sampah dari TPA ke rumah mereka. Akan ada pengepul yang datang dan mengambil barang tersebut.

"Untuk plastik harga per kilogramnya Rp 250, botol air mineral kotor Rp 1.500, botol air mineral bersih Rp 4.500," kata Ubay. Total setiap bulan Ubay rata-rata mendapat Rp 800 ribu dari kegiatan memulung.

\*\*\*

Walaupun ratusan pemulung berjejal di TPA Punggur, sampai saat ini sampah di sana tak pernah menyusut. Sebaliknya, makin lama makin menggunung. Syamsul mengingat, lima tahun lalu ia mulai memulung di TPA Punggur, ketinggian sampah berada di bawah jalan tanah saat ini. Sekarang, ketinggian gunungan sampah lebih dari 10 meter di atas jalan. Artinya, makin lama sampah makin memenuhi kawasan itu.

Penyebab utamanya adalah tidak adanya pengolahan sampah rumah tangga yang dibuang di sana. Baju, kulit kabel, potongan karet, pecahan kaca, atau botol air mineral yang rusak merupakan beberapa sampah tidak menarik perhatian pemulung. Hal ini mengkhawatirkan Pemerintah Kota Batam.

"Dari kajian terhadap TPA Punggur, kalau sampah dibiarkan tidak dikelola, kawasan itu hanya bertahan selama delapan tahun," kata Ketua Panitia Lelang Swastanisasi TPA Telagapunggur Faisal Riza, Jumat pekan lalu. Faisal sempat menjabat sebagai Kepala Bidang Kebersihan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Batam sampai sebulan yang lalu saat ia pindah tugas ke Dinas Perhubungan Kota Batam.

Meski saat ini tak dikelola, kenyataannya tahun 2009 sampah di Batam pernah dikelola oleh perusahaan swasta PT Surya Sejahtera (SS). Saat itu, SS berencana mengembangkan instalasi pembangkit listrik berbahan bakar sampah.

Rencananya perusahaan itu akan membangun dua instalasi penting yang mereka gunakan untuk menggunakan potensi sampah pembangkit listrik, yakni insinerator dan pengembangan gas metana (CH4). Insinerator berfungsi untuk mengeringkan dan membakar sampah berbahan apa saja, yang nantinya menghasilkan panas yang akan digunakan sebagai pembangkit listrik. Sementara, instalasi pengembangan gas metana semacam membuat tangki kakus (septic tank). Bahan organik dihancurkan, dimasukkan ke dalam tabung yang ditutup plastik, dan setelah beberapa tahun pipa ditanamkan untuk mengeluarkan gas metana yang ada di dalam tumpukan sampah itu.

Salah satu bekas petinggi SS mengatakan, insinerator dapat menghasilkan daya hingga 20 mega watt dengan membakar 1000 ton sampah. Dalam rencananya, bahan bakar untuk membakar sampah menggunakan gas metana.

Keterlibatan SS dalam pengelolaan sampah di Batam berawal dari keinginan Pemko Batam mengadakan swastanisasi pengolahan sampah. Saat itu, inisiatif dan rencana ini merupakan yang pertama di Indonesia. Pada 25 September 2007, Pemko mengumumkan pra kualifikasi lelang. Ada 10 perusahaan termasuk Surya Sejahtera yang memasukkan penawaran. Dalam perjalanannya SS kemudian diumumkan sebagai pemenang pada 4 April 2008 dan resmi mengelola TPA Sampah di Batam selama 25 tahun sejak 1 April 2009.

Mantan humas SS, Budi Manalu, Kamis pekan lalu menceritakan, rencana investasi perusahaan saat itu mencapai Rp 560 miliar. Jumlah itu melingkupi seluruh aspek pengelolaan sampah di hulu seperti pengangkutan dan penyediaan bak sampah serta pengolahan sampah di TPA Punggur.

Untuk mengangkut sampah, SS menyediakan hingga 125 unit kendaraan. Itu belum termasuk kendaraan pick up dan motor dengan bak gandeng. Dua jenis kendaraan terakhir digunakan untuk mengangkut sampah di jalur-jalur yang sempit. "Kami sampai masuk ke ruli (perumahan liar) dengan Tossa (motor bak gandeng) untuk mengangkut sampah," terang Budi.

Keterlibatan SS dalam pengelolaan sampah di hulu berfungsi agar konsep pengelolaan sampah bisa berlangsung konsisten. untuk itu SS memantapkan pelayanan mereka di pengangkutan sampah dengan mengangkut sampah pelanggan dua sampai tiga kali dalam seminggu. Dalam sehari SS dapat mengangkut hingga 800 ton sampah ke TPA Punggur.

Mampu mengangkut sampah sebanyak itu, membuat SS makin percaya diri untuk membangun pabrik pengolahan sampah di TPA Punggur. Perusahaan mulai berencana bekerja sama dengan perusahaan asing. Beberapa perusahaan daerah juga tertarik.

"Pabrik (pengolahan sampah,red) itu sendiri ratusan miliar, contohnya Sembcorp yang ada di Singapura. Sampah yang dimasukkan langsung terpilah," kata Budi.

Perusahaan memiliki rencana menjadikan Batam sebagai pilot project pengelolaan sampah oleh swasta. Saking totalnya, Pemko Batam bahkan tak perlu membelanjakan APBD untuk pengeluaran sampah. Pasalnya, meski retribusi ditarik oleh SS, ada pembagian hasil dari retribusi sampah itu. Pemko juga mendapat dana tambahan dari setiap ton yang masuk ke TPA Punggur.

"Jumlahnya sekitar Rp 5 ribu," kata Budi, mencoba mengingat. "Saat itu kami memang menerapkan zero cost untuk Pemko."

Tanpa dana yang diterima dari Pemko Batam, mengapa SS mau total menggelontorkan sumberdaya untuk pekerjaan itu? Perusahaan tersebut melihat, keberhasilan di Batam sebagai pilot project menjadi jembatan bagi SS untuk mengurusi persoalan sampah di kota-kota lain di Indonesia.

"Saat itu sudah ada 10 kota yang sudah antre meminta kami mengelola sampah di sana," terang Budi.

Selain itu, hasilnya dari produk-produk olahan sampah berpotensi pemasukan miliaran rupiah bagi SS. Air lindi, limbah sampah yang telah diolah, dapat menghasikan pupuk cair. Sisa kotorannya diubah menjadi pupuk urea. Hasil pemanfaatan lindi dan urea itu pernah dipuji Menteri Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar dalam acara Pekan Lingkungan Hidup tahun 2009.

"Dari air lindi saja bisa mendapatkan keuntungan miliaran," ujar Budi.

Budi menambahkan, dalam perhitungan SS, pengembalian modal investasi dapat berlangsung paling cepat tahun kelima atau paling lambat tahun ke-10. Kemudian, insinerator sebagai pembangkit listrik sudah mulai dikerjakan pada tahun ketujuh. Untuk menambah kekuatan investasinya, SS kemudian menggandeng PT Envirotama Lestari Sejahtera Indonesia (ELSI) kemudian berganti nama menjadi PT Surya Sejahtera Envirotech (SSET) pada pertengahan September 2009.

Penggabungan ini dipermasalahkan sejumlah pihak karena dianggap cacat hukum. Apalagi afiliasi dua perusahaan itu belum mendapat izin dari Pemko Batam. Pemko beralasan, perubahan pemegang saham atau susunannya dapat dilakukan apabila sekurang-kurangnya satu tahap pekerjaan konstruksi pengelolaan sampah telah selesai.

Persoalan tambah pelik saat SSET meminta kenaikan tarif karena terus merugi. Masalah ini terus berlanjut dan bermuara pada mundurnya SSET dari proyek swastanisasi sampah pada 2 November 2010. Dari kacamata Pemko Batam, SSET sendiri tidak dapat memenuhi persyaratan salah satunya jumlah armada. Sejumlah armada yang dimiliki SSET saat itu merupakan milik mitra. Pascacabutnya SSET, pengangkutan sampah kembali dikendalikan DKP Batam.

Budi tidak menyangkal kalau SSET mundur karena merugi. Dalam hitungan SSET, kata Budi, kerugian perusahaan mencapai Rp 53 miliar.

"Sebagai investor kita melihat perkembangan investasinya dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kalau dalam jangka pendek prospeknya sudah buruk seperti itu, bagaimana mau untung?" jelas Budi.

Salah satu penyebab kerugian SSET adalah tidak jelasnya wewenang mereka untuk mengangkut sampah industri. Salah satu petinggi SSET mengatakan, ketidakjelasan itu disebabkan adanya kepentingan pengusaha yang lebih dulu bergerak di dalam pengangkutan limbah industri.

Budi menjelaskan, pemasukan dari sampah industri sangat mereka harapkan. Padahal dalam kontrak, seluruh sampah di Batam wajib dikumpulkan di TPA Punggur.

"Ada teknis yang tidak sinkron (soal pengelolaan limbah industri). Untuk itu seharusnya ada jaminan dan ketegasan hukum dalam melakukan hal itu," kata Budi.

Pascapengunduran diri SSET, warisan perusahaan tak hilang begitu saja. Pemko Batam masih menggunakan model pengelolaan sampah yang dirancang oleh perusahaan tersebut. Zona-zona pembagian di TPA Punggur masih menggunakan pembagian zona yang dibuat SSET. Gambar denah TPA Punggur dengan logo SSET pada bagian pojok kiri atas masih tergantung di dinding kantor pengelola TPA. Bengkel pembuatan kompos dan dan produk-produk hasil sampah berada tepat di kanan kantor. Luas bengkel itu empat kali kantor pengelola.

Ada delapan bak kompos seluas 3 meter persegi di kolong bangunan berbentuk panggung itu. Bau menyengat kompos yang sedang diproses menyengat hidung siapa saja yang mendekat. Salah seorang pegawai kantor pengelola mengatakan kompos itu baru sebatas coba-coba.

"Belum ada rencana dijual, soalnya jumlahnya juga sedikit. Itu juga kami langsung ambil dari sampah-sampah di pasar dan tidak dipilah sepenuhnya," kata dia. Memang di dalam bak masih tampak plastik, botol air mineral, atau batok kelapa.

Pengelolaan gunungan sampah juga masih mengikuti pekerjaan SSET. Sampah yang datang diratakan, kemudian ditimbun dengan tanah. Satu lagi warisan SSET adalah bakteri yang menghilangkan bau busuk sampah. Tidak tercium bau menyengat di dekat gunungan sampah TPA Punggur. Bau busuk Tempat Pembuangan Sementara (TPS) lebih menyengat ketimbang TPA Punggur.

\*\*\*

Bagi pulau kecil seperti Batam, sampah jelas menjadi masalah. Sampah pasti akan bertumpuk di pulau itu. Pengelolaan yang tidak profesional berakibat pada buruknya tingkat kebersihan, rendahnya estetika kota, dan mengancam kesehatan masyarakat.

Selama tiga tahun, pengangkutan sampah yang dilakukan oleh Pemko Batam melalui jasa kontraktor pemenang lelang, jauh dari memuaskan. Pengangkutan kerap terlambat, khususnya sekitar hari raya Idul Fitri. Pada masa itu, sampah biasanya bertumpuk hingga lebih dari dua minggu.

Bulan September lalu, Wakil Wali Kota Batam Rudi mengungkapkan rencana Pemko untuk mengakhiri jasa swasta dalam hal pengangkutan sampah. Di bulan yang sama, Pemko Batam juga memulai tahap pra kualifikasi lelang Swastanisasi TPA Punggur.

Tiga tahun tanpa pengelola, Pemko Batam kembali membuka peluang swasta mengelola TPA Punggur. Hal itu dilandasi oleh kajian Pemko Batam bersama Badan Pembangunan Nasional (Bappenas). Investasi yang ditanamkan mencapai Rp 1,5 triliun. Ketua Panitia Swastanisasi TPA Punggur Faisal Riza mengatakan angka itu belum cukup. Peserta juga harus memiliki aset hingga Rp 3 triliun.

Pemko menyadari pentingnya mengelola sampah di Pulau Batam. Apalagi, hasil kajian Pemko Batam dan Bappenas yang dibantu oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) mengatakan sampah Batam berpotensi untuk dimanfaatkan menjadi energi listrik.

"Jika sampah di TPA Punggur dikelola, paling tidak kawasan itu bisa berkelanjutan selama 25 tahun," kata Faisal.

Penambahan sampah Batam diprediksi akan terus meningkat. Sejumlah indikator yang dapat menyebabkan peningkatan jumlah sampah adalah angka pertambahan penduduk mencapai 14 persen. Hingga bulan Juli 2013, jumlah penduduk Batam mencapai 1.134.068 jiwa. Indikator lain adalah industri-industri baru yang beroperasi di Batam.

Dengan potensi penambahan sampah, pengelolaan sampah sangat mendesak. "Sebagai pulau kecil, penambahan luas TPA di Batam tidak baik untuk masyarakat dan lingkungan pulau tersebut. Lahan di Batam sangat terbatas," kata Kepala Balai Teknologi Lingkungan - Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BTL BPPT), Arie Herlambang, yang dihubungi Sabtu pekan lalu. Balai tersebut merupakan bagian BPPT yang bergerak dalam teknologi pengolahan dan pengelolaan sampah.

Faisal mengatakan, dalam Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dalam pengelolaan sampah di TPA Punggur akan menggunakan konsep Waste to Energy. "Dari awal memang kami menetapkan pengelolaan TPA Punggur harus menghasilkan energi listrik," terang Faisal.

Sejak pra kualifikasi dibuka akhir September 2013, ada 24 perusahaan yang berminat mengikuti lelang. Enam di antaranya adalah investor asing, diantaranya dari India, Jepang, dan Amerika Serikat. Faisal memprediksi, proses lelang akan berlangsung lebih kurang satu tahun.

Berbeda dengan SSET, pemenang hanya akan membangun insinerator untuk pengelolaan sampah. Kepala Bidang Peningkatan Pelayanan DKP Kota Batam, Zakaria lewat pesan singkat mengungkapkan insinerator wajib segera dibangun setelah penetapan pemenang. Ia juga menambahkan, dalam KPS, swasta akan mengelola hingga sampah hingga menghasilkan listrik. Sementara pengangkutan sampah dikerjakan oleh Pemko Batam. Kewenangan swasta juga dipertegas hanya mengelola sampah rumah tangga, bukan limbah industri.

Arie Herlambang mengatakan, membangun insinerator merupakan pilihan terbaik bagi daerah yang letaknya di pulau dengan jumlah penduduk yang besar.

"Insinerator dapat mengurangi sampah dengan cepat. Sampah yang datang setiap harinya dapat dibakar dan dengan cepat diubah menjadi listrik," ujar Arie.

Berbeda dengan metode gas metana yang harus menunggu lama untuk menunggu gas terbentuk, insinerator bisa segera dioperasikan begitu instalasinya jadi. Kekurangan lain dari gas metana adalah produksinya yang tidak konstan. "Saat dipanen gas metana juga harus dipisahkan dengan senyawa lain seperti sulfur dan hidrogen sulfida," tambah Arie.

Soal modal Rp 1,5 triliun, Arie mengatakan jumlah itu relatif. Hal itu tergantung pada fasilitas yang dimiliki Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa). Hal tersebut melingkupi kapasitas dan sistem yang digunakan oleh PLTSa. Sedangkan, soal lahan menurut dia 17 hektare yang saat ini digunakan untuk TPA Punggur sudah cukup untuk membangun PLTSa.

Terkait lahan, Pemko Batam dan Badan Pengusahaan Kawasan Batam harus segera mengusahakan lahan TPA Punggur jelas. Direktur Humas dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu BP Batam, Dwi Djoko Wiwoho mengatakan saat ini sedang dibahas apakah lahan TPA Punggur seluas 45 hektare akan diserahkan atau dipinjam pakaikan BP Batam kepada Pemko.

"Karena lahan di Batam ini aset Pemerintah Pusat, ada aturan pelimpahan aset harus dengan persetujuan Menteri Keuangan," kata Djoko.

"Pada prinsipnya ada kesepakatan," kata Zakaria, terkait pembahasan lahan TPA Punggur. "Semuanya dalam proses."

Budi Manalu mengatakan, calon investor memerlukan kejelasan status lahan tempat mereka akan berinvestasi. Pasalnya mereka akan menanamkan modal besar dengan perencanaan operasional selama 25 tahun. Ia mengingat saat SSET mengerjakan pengelolaan sampah, status lahan belum jelas karena hanya disewa Pemko dari BP Batam.

Faisal berharap status lahan sudah jelas pada Januari tahun depan. "Kalau tidak, kita tak bisa lelang," kata dia, tersenyum.

Soal pemasukan, investor tak perlu khawatir. Berbeda dengan kebijakan zero cost saat pengelolaan sampah dipegang SSET, kali ini pemerintah akan membayar setiap ton sampah yang masuk ke TPA Punggur. Tipping fee untuk itu, kata Faisal, akan diatur dalam perda khusus KPS yang diharap akan selesai sebelum pengumuman pemenang lelang. Saat PLTSa sudah berfunsi, Zakaria mengatakan hasil penjualan listrik tidak akan dibagi dengan Pemko Batam.

"Hasil penjualan listrik hanya untuk investor," jelas Zakaria.

Berapa potensi listrik yang dapat dihasilkan sampah di Batam? Faisal belum bisa memastikan. "Akan ada proses selanjutnya dalam lelang yang menentukan berapa daya yang dihasilkan oleh PLTSa di TPA Punggur."

Arie memberi gambaran, pembakaran satu ton sampah di insinerator dapat menghasilkan 1,5 juta kalori. Perhitungan daya yang dihasilkan akan bergantung pada efisiensi dan spesifikasi dari insinerator. Sebagai gambaran, rencana insinerator SSET memproduksi listrik berdaya maksimal 20 megawatt dari pembakaran 1.000 ton sampah.

Peluang mendapat pembeli listrik memang besar karena Pemerintah telah menetapkan harga tenaga listrik berbasis sampah kota. Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral nomor 19 tahun 2013 tentang Pembelian Listrik Oleh PT PLN (Persero) Dari Pembangkit Listrik Berbasis Sampah Kota. Dalam peraturan itu PLN wajib membeli listrik berbasi sampah kota. Harganya berkisar Rp 1.259 - Rp 1.798, tergantung teknologi dan dayanya.

Khusus untuk Batam, karena urusan kelistrikan menjadi urusan PT Pelayanan Listrik Nasional Batam (PLN Batam), anak perusahaan PT PLN (Persero), Faisal mengatakan, "Pemko Batam bersama PLN Batam perlu menemukan kesepakatan penjualan listrik berbasis sampah."

Kombinasi meningkatnya limbah dan sampah yang dibuang warga Batam dan terbatasnya lahan Pulau Batam seharusnya mendorong stakeholder dalam pengelolaan sampah memanfaatkan potensi ini sebagai satu sumber energi alternatif yang berkelanjutan. Belajar dari pengalaman kala SSET mengelola sampah Kota Batam, regulator perlu memberi ketegasan hukum agar investor bisa mengejakan. Meski bertindak sebagai pengawas dan mitra, Pemerintah Kota perlu menjaga agar investor punya kebebasan dan kreativitas sehingga mampu memberikan hasil masimal pada warga Batam. Arie Herlambang mengungkapkan, hasil pengelolaan sampah tak sekedar energi listrik. "Yang utama masyarakat menikmati lingkungan yang bersih dan kesehatan untuk kualitas kehidupan yang lebih baik."

(Reportase ini dibantu oleh Ahmadi)